

2025

LAPORAN KEUANGAN AUDITED



LAPORAN
KEUANGAN
AUDITED 2025



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Barat

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pimpinan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Perangkat Daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Laporan Operasional menunjukkan informasi Pendapatan-LO dan Beban.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit)-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan uraian tentang kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bandung, 26 Mei 2026
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



DEDI MULYADI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197603021997011001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab.....	v
Ringkasan.....	vi
Laporan Realisasi Anggaran.....	x
Neraca	xi
Laporan Operasional.....	xii
Laporan Perubahan Ekuitas.....	xiii
Catatan atas Laporan Keuangan.....	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi	2
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	5
2.1 Ekonomi Makro	5
2.2 Kebijakan Strategis	6
2.3 Kebijakan Keuangan.....	7
2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PD	9
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD.....	9
3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	11
3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditentukan	11

BAB IV	KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	12
4.1	Entitas Akuntansi.....	12
4.2	Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.3	Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	13
4.4	Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	14
4.5	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP	21
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	22
5.1	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	22
5.1.1	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran.....	22
5.1.2	Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	24
5.1.3	Catatan Penting Lainnya	34
5.2	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	35
5.2.1	Penjelasan Umum Neraca	35
5.2.2	Penjelasan Per Pos Neraca	35
5.2.3	Catatan Penting Lainnya	51
5.3	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	52
5.3.1	Penjelasan Umum Laporan Operasional.....	52
5.3.2	Penjelasan Per Pos Laporan Operasional.....	52
5.3.3	Catatan Penting Lainnya	60
5.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	61
5.4.1	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	61
5.4.2	Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas	62
5.4.3	Catatan Penting Lainnya	64
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN BAPPEDA	65
BAB VII	PENUTUP	68
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Lampiran	2	Daftar Piutang Pajak
Lampiran	3	Daftar Piutang Retribusi
Lampiran	4	Daftar Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Lampiran	5	Daftar Beban Dibayar Dimuka
Lampiran	6	Daftar Saldo Persediaan
Lampiran	7	Daftar Persediaan
Lampiran	8	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran	9	Daftar Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran	10	Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Daerah
Lampiran	11	Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
Lampiran	12	Daftar Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Lampiran	13	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka
Lampiran	14	Rincian Pendapatan-LO
Lampiran	15	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Pegawai, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, Hibah, Bantuan Sosial dan Lain-lain
Lampiran	16	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Persediaan
Lampiran	17	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Jasa
Lampiran	18	Beban Penyusutan dan Amortisasi
Lampiran	19	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neraca dan LRA
Lampiran	--	Berita Acara Pemeriksaan Kas
Lampiran	--	Berita Acara <i>Stock Opname</i>
Lampiran	--	Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan Daerah
Lampiran	--	Berita Acara Rekonsiliasi Belanja Daerah
Lampiran	--	Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Lampiran	--	Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah
Lampiran	--	Bukti Tagihan – Untuk Akun Utang Belanja
Lampiran	--	Jurnal Koreksi Audit

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (LO); (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bandung, 26 Mei 2026
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



DEDI MULYADI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197603021997011001

2 14

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I.

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 *Audited* ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp12,000,000.00 atau sebesar 100.00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp12,000,000.00. Jumlah realisasi Pendapatan-LRA tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah-LRA.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp0.00 atau mencapai 0.00 persen dari yang dianggarkan, Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp12,000,000.00 atau mencapai 100.00 persen dari yang dianggarkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar Rp0.00 atau mencapai 0.00 persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp71,264,020,769.00 atau mencapai 96.76 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp73,649,738,528.00. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp66,608,149,734.00 atau 96.61 persen dari yang dianggarkan dan Belanja Modal sebesar Rp4,655,871,035.00 atau 98.90 persen dari yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA sebesar Rp12,000,000.00 dan Belanja sebesar Rp71,264,020,769.00 diperoleh Surplus/(Defisit)-LRA sebesar (Rp71,252,020,769.00).

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah) :

Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Audited)		Tahun Anggaran 2024 (Audited)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan-LRA	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
Pendapatan Asli Daerah-LRA	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00

Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Audited)		Tahun Anggaran 2024 (Audited)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Pajak Daerah-LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja	73,649,738,528.00	71,264,020,769.00	80,381,974,385.00	78,443,715,638.00
Belanja Operasi	68,942,239,013.35	66,608,149,734.00	77,986,836,206.00	76,221,490,888.00
Belanja Pegawai	42,595,967,346.00	41,081,788,525.00	39,997,159,330.00	38,781,728,191.00
Belanja Barang dan Jasa	26,346,271,667.35	25,526,361,209.00	37,989,676,876.00	37,439,762,697.00
Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal	4,707,499,514.65	4,655,871,035.00	2,395,138,179.00	2,222,224,750.00
Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3,858,710,753.05	3,809,040,935.00	2,395,138,179.00	2,222,224,750.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	848,788,761.60	846,830,100.00	0.00	0.00
Surplus/(Defisit)-LRA	(73,637,738,528.00)	(71,252,020,769.00)	(80,369,974,385.00)	(78,431,715,638.00)

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17,448,876,909.00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp73,007,295.00, Aset Tetap sebesar Rp17,171,397,009.00 dan Aset Lainnya sebesar Rp204,472,605.00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp35,302,817.00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp17,413,574,092.00.

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 dapat disajikan pada tabel berikut dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2025 (Audited)	31 Desember 2024 (Audited)
Aset Lancar	73,007,295.00	78,936,175.00
Aset Tetap	17,171,397,009.00	14,747,115,473.00
Aset Lainnya	204,472,605.00	204,472,605.00
Jumlah Aset	17,448,876,909.00	15,030,524,253.00
Kewajiban Jangka Pendek	35,302,817.00	45,650,636.00
Jumlah Kewajiban	35,302,817.00	45,650,636.00
Ekuitas	17,413,574,092.00	14,984,873,617.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	17,448,876,909.00	15,030,524,253.00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menunjukkan kinerja sesungguhnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Tahun Anggaran 2025. Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp12,000,000.00, Beban Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp68,236,889,356.00, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2025 dan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp68,224,889,356.00).

Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Audited)	Tahun Anggaran 2024 (Audited)
Pendapatan-LO	12,000,000.00	12,000,000.00
Beban	68,236,889,356.00	77,927,965,342.00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(68,224,889,356.00)	(77,915,965,342.00)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0.00	0.00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0.00	0.00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0.00	0.00
Pos Luar Biasa	0.00	0.00
Surplus/(Defisit)-LO	(68,224,889,356.00)	(77,915,965,342.00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp14,984,873,617.00, Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp68,224,889,356.00), RK PPKD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp71,252,020,769.00, RA PPKD (Perolehan) Tahun Anggaran 2025 sebesar (Rp669,120,260.00),

RA PPKD (Penyusutan) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp70,689,322.00, Ekuitas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0.00, dan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp17,413,574,092.00.

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2025 (Audited)	Tahun Anggaran 2024 (Audited)
Ekuitas Awal	14,984,873,617.00	14,469,123,321.00
Surplus/(Defisit)-LO	(68,224,889,356.00)	(77,915,965,342.00)
RK PPKD	71,252,020,769.00	78,431,715,638.00
RA PPKD (Perolehan)	(669,120,260.00)	0.00
RA PPKD (Penyusutan)	70,689,322.00	0.00
Ekuitas	0.00	0.00
Ekuitas Akhir	17,413,574,092.00	14,984,873,617.00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Pendapatan – LRA, Belanja dan Pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Laporan Operasional yang terdiri dari Pendapatan – LO dan Beban; Neraca yang terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah.

Dalam CaLK ini diungkapkan juga kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.